

HABITUS ELIT PARTAI DAN REPRODUKSI BUDAYA POLITIK PILKADA KOTA MEDAN

Gadis Anastasia¹, Mhd Ricky Ardiansyah Putra², Habibah Hanim Lubis³,
Umar Haddad Siregar⁴

Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan¹²⁴
Pendidikan Tata Rias, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan³

Email: gadistasia@unimed.ac.id^{1*}, ricky_ardian@unimed.ac.id²,
habibahanimlubis@unimed.ac.id³, umathahhadsiregar@gmail.com⁴

Abstract

This study explores how the habitus of party elites contributes to the formation and reproduction of political culture in the Medan City Local Election. It is based on the premise that local political dynamics are shaped not only by formal democratic institutions but also by socio-cultural factors that influence the behavior, decision-making, and political strategies of key actors. A qualitative approach with a case study design was employed to gain an in-depth understanding of the phenomenon. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentary analysis, and were examined using an interactive analytical process informed by Pierre Bourdieu's concepts of habitus, capital, and field. The findings reveal that party elite habitus is developed through organizational experience, cadre formation, and the continuous accumulation of social, cultural, and symbolic capital. Political culture is reproduced through candidate recruitment, patronage networks, the strategic use of religious symbols, and the reinforcement of organizational loyalty. The study concludes that the Medan City Local Election functions as a political arena in which habitus, capital, and power interact to sustain elite dominance and ensure the continuity of local political culture. The findings of this study are expected to advance the development of political anthropology and political sociology by providing theoretical insights and practical policy recommendations for fostering a more participatory, inclusive, and socio-culturally responsive local democracy.

Keywords: Party Elite Habitus; Political Culture; Medan Local Election; Political Parties; Sociocultural Perspective.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran habitus elit partai dalam membentuk serta mereproduksi budaya politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan. Kajian ini berangkat dari asumsi bahwa dinamika politik lokal tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme demokrasi formal, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya yang membentuk perilaku, strategi, serta praktik para aktor politik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara[1.1]ra interaktif menggunakan perspektif Pierre Bourdieu mengenai habitus, modal, dan arena. Hasil penelitian menunjukkan bahwa habitus elit partai terbentuk melalui pengalaman organisasi, proses kaderisasi, serta akumulasi modal sosial, budaya, dan simbolik yang berlangsung secara berkesinambungan. Reproduksi budaya politik terjadi melalui mekanisme kandidasi, hubungan patronase, pemanfaatan simbol keagamaan, dan penguatan loyalitas organisasi. Temuan ini menegaskan bahwa Pilkada Kota Medan merupakan arena politik tempat habitus dan berbagai bentuk modal berinteraksi dalam mempertahankan dominasi elit sekaligus mereproduksi budaya politik lokal secara berkelanjutan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan kajian antropologi dan sosiologi politik sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang mendorong demokrasi lokal yang lebih partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial budaya masyarakat.

Kata Kunci: Habitus Elit Partai; Budaya Politik; Pilkada Kota Medan; Partai Politik; Sosiokultural.

PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi lokal di Indonesia pasca-Reformasi telah menempatkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai instrumen utama untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat dan memperluas ruang kedaulatan rakyat. Melalui Pilkada langsung, warga memperoleh kesempatan untuk menentukan pemimpin daerah secara lebih terbuka dibandingkan mekanisme sebelumnya yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di tingkat lokal tidak selalu berjalan sejalan dengan prinsip partisipasi substantif karena masih dibayangi oleh praktik oligarki, patronase, politik uang, dan dominasi elit partai politik dalam proses kandidasi maupun pengambilan keputusan strategis (Aspinall & Berenschot, 2019). Menurut (Aspinall & Berenschot, 2019) praktik demokrasi elektoral di Indonesia hingga saat ini masih tidak dapat dilepaskan dari keberadaan jaringan patronase yang berakar kuat dalam kehidupan politik. Dalam banyak kasus, proses politik tidak hanya berjalan berdasarkan aturan dan prosedur demokrasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan personal, pertukaran kepentingan, serta akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh aktor-aktor tertentu. Situasi tersebut menunjukkan bahwa relasi kekuasaan informal tetap memiliki peran penting dalam menentukan arah dan hasil kontestasi politik. Akibatnya, kompetisi politik sering kali berlangsung melalui mekanisme yang melampaui kerangka kelembagaan yang secara resmi diatur oleh sistem demokrasi.

Fenomena tersebut tampak jelas dalam penyelenggaraan Pilkada yang tidak sekadar menjadi sarana pemilihan pemimpin daerah, tetapi juga berfungsi sebagai arena tempat berbagai aktor mempertahankan maupun memperluas pengaruh politiknya. Dalam arena ini, kekuatan politik dibentuk melalui pemanfaatan beragam sumber daya, seperti jaringan sosial, kapasitas ekonomi, legitimasi budaya, dan pengakuan simbolik yang dimiliki oleh para pelaku politik. Berbagai bentuk modal tersebut kemudian dikonversi menjadi instrumen untuk memperoleh dukungan sekaligus memperkuat posisi dalam kontestasi elektoral. Dengan demikian, Pilkada dapat dipahami sebagai ruang sosial yang memungkinkan berlangsungnya proses reproduksi kekuasaan secara berkelanjutan. Atas dasar itu, kajian mengenai demokrasi lokal tidak cukup hanya menitikberatkan perhatian pada aspek kelembagaan dan prosedural semata. Pemahaman yang lebih komprehensif memerlukan analisis terhadap faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi tindakan politik para aktor dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan

semacam ini memungkinkan peneliti melihat bagaimana nilai, norma, kebiasaan, serta relasi sosial membentuk praktik politik yang berkembang di tingkat lokal. Oleh karena itu, dimensi sosio-kultural menjadi elemen penting untuk menjelaskan dinamika kekuasaan yang berlangsung dalam kontestasi politik daerah.

Dalam konteks tersebut, partai politik memiliki posisi sentral sebagai institusi yang menentukan proses rekrutmen, seleksi, dan distribusi kekuasaan dalam Pilkada. Meskipun secara normatif partai politik berfungsi sebagai sarana kaderisasi dan artikulasi kepentingan masyarakat, dalam praktiknya berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses pencalonan kepala daerah masih didominasi oleh elit partai yang memiliki akses terhadap sumber daya strategis dan jaringan kekuasaan yang luas (Mietzner, 2020). Fenomena ini memperlihatkan bahwa keputusan politik sering kali tidak sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme demokratis internal partai, melainkan dipengaruhi oleh relasi patronase, loyalitas organisasi, serta kedekatan dengan pimpinan partai di tingkat pusat. Dalam perspektif Bourdieu (2019), situasi seperti ini disebut dengan *habitus*, yaitu seperangkat disposisi yang terbentuk melalui pengalaman historis dan kemudian memengaruhi cara individu berpikir, bertindak, serta memaknai dunia sosial (Bourdieu, 2019). *Habitus* elit partai kemudian menjadi dasar bagi reproduksi budaya politik yang terus berlangsung melalui praktik-praktik organisasi, pola komunikasi, mekanisme kaderisasi, dan strategi pengelolaan kekuasaan. Dengan demikian, politik lokal tidak hanya diproduksi melalui regulasi formal, tetapi juga melalui proses internalisasi nilai dan praktik budaya yang diwariskan secara berulang dalam arena politik.

Fenomena reproduksi budaya politik tersebut tampak semakin relevan dalam dinamika Pilkada Kota Medan yang selama beberapa periode menunjukkan keterkaitan erat antara kekuatan elit partai, politik identitas, dan jaringan kekuasaan. Berdasarkan data dari KPU Kota Medan (2020) telah memperlihatkan di bagian partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Medan tahun 2020 mencapai sekitar 45%, yakni menjadi salah satu kota yang tingkat partisipasinya terendah dibandingkan kota besar lainnya yang ada di Indonesia, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kualitas keterlibatan masyarakat dalam demokrasi lokal. Di sisi lain, kemenangan pasangan Wali Kota Medan Bobby-Aulia saat Pilkada Kota Medan tahun 2020, yakni saat pemilihan Wali Kota Medan yang memperlihatkan kuatnya pengaruh jejaring politik nasional,

dukungan koalisi partai besar, serta mobilisasi identitas sosial dalam proses kontestasi politik lokal (Ubaidullah, 2022). Penelitian (Ikhsan et al., 2024) juga menemukan bahwa proses seleksi kandidat kepala daerah di Medan masih dipengaruhi oleh dominasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP), oligarki internal partai, dan keterbatasan ruang partisipasi kader di tingkat daerah. Situasi ini menunjukkan bahwa perilaku politik elit tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan rasional untuk memperoleh kekuasaan, melainkan sebagai hasil reproduksi budaya politik yang berlangsung melalui pembentukan habitus, pemanfaatan modal simbolik, serta relasi sosial yang terpelihara dalam arena organisasi politik. Dengan kata lain, Pilkada Medan menjadi arena yang memperlihatkan bagaimana habitus elit bekerja dalam mempertahankan legitimasi dan posisi mereka dalam struktur kekuasaan lokal.

Meskipun kajian mengenai Pilkada di Indonesia telah berkembang cukup pesat, sebagian besar penelitian masih berfokus pada isu politik uang, oligarki, perilaku memilih, politik identitas, maupun efektivitas sistem elektoral. Penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara habitus elit partai dan reproduksi budaya politik masih relatif terbatas, terutama pada level lokal dan dalam perspektif antropologi politik. Beberapa studi memang telah mengungkap adanya sentralisasi keputusan partai dan dominasi elit dalam proses kandidasi kepala daerah, tetapi belum banyak yang menjelaskan bagaimana nilai, norma, simbol, dan pengalaman organisasi membentuk disposisi para elit dalam menjalankan praktik politik sehari-hari (Hadiz, 2017). Padahal, menurut Bourdieu (2019), reproduksi kekuasaan berlangsung secara efektif ketika habitus yang dimiliki para aktor mampu diterima sebagai sesuatu yang wajar dan sah oleh kelompok sosial di sekitarnya. Dengan demikian, terdapat kesenjangan akademik yang penting untuk diisi, yaitu bagaimana habitus elit partai berperan dalam mereproduksi budaya politik yang membentuk dinamika Pilkada di tingkat lokal. Kesenjangan tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan perubahan konfigurasi politik dan meningkatnya peran elit partai dalam menentukan arah demokrasi daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Habitus Elit Partai dan Reproduksi Budaya Politik Pilkada Kota Medan” ini penting dilakukan karena berupaya mengungkap dimensi sosio-kultural yang kerap terabaikan dalam studi Pilkada, yang selama ini lebih banyak menitikberatkan perhatian pada aspek formal, prosedural, dan

kelembagaan politik. Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana pengalaman organisasi, jaringan sosial, modal simbolik, dan praktik keseharian para pimpinan partai membentuk habitus politik yang kemudian direproduksi dalam arena Pilkada Medan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengungkap bagaimana budaya politik lokal dipertahankan, dinegosiasikan, dan direproduksi melalui interaksi antara elit partai, kandidat kepala daerah, dan masyarakat.

Dari sisi akademik, kajian ini diharapkan dapat menambah pengembangan literatur dalam bidang antropologi politik dan sosiologi politik dengan menghadirkan pembacaan mengenai demokrasi lokal melalui perspektif habitus, modal, dan arena. Selain memberikan sumbangan konseptual, penelitian ini juga diharapkan menghasilkan pemahaman yang bermanfaat bagi pengembangan praktik demokrasi yang lebih terbuka, melibatkan masyarakat secara luas, serta mampu mengakomodasi keragaman sosial dan budaya yang menjadi karakteristik Kota Medan.

METODE

Dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, penelitian ini berupaya mengungkap berbagai proses sosial yang membentuk habitus elit partai sekaligus menjelaskan bagaimana budaya politik direproduksi dalam arena kontestasi Pilkada Kota Medan. Pemilihan studi kasus didasarkan pada pertimbangan bahwa fenomena politik lokal tidak dapat dipahami secara utuh melalui pengukuran kuantitatif, melainkan memerlukan penelusuran terhadap makna, pengalaman, dan praktik sosial yang berkembang di dalam arena politik tertentu. Menurut (Yin, 2018) strategi studi kasus dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang berlangsung dalam situasi nyata, terutama ketika interaksi antara fenomena yang diteliti dan konteks sosialnya membentuk hubungan yang kompleks dan tidak mudah dipisahkan secara analitis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam interaksi antara habitus elit, modal politik, dan arena kekuasaan sebagaimana dirumuskan oleh Pierre Bourdieu. Oleh karena itu, desain studi kasus dipandang relevan untuk mengungkap proses reproduksi budaya politik yang berlangsung dalam dinamika Pilkada Kota Medan sebagai salah satu wilayah politik strategis di Indonesia.

Dalam perspektif konstruktivisme, realitas sosial dipahami sebagai hasil konstruksi bersama yang lahir dari proses interaksi, pengalaman, dan penafsiran para

aktor terhadap lingkungan sosial tempat mereka berpartisipasi. Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan paradigma tersebut untuk memahami makna yang melatarbelakangi praktik politik para elit partai dalam Pilkada Kota Medan. Paradigma ini digunakan karena perilaku politik elit partai tidak dapat dipahami sebagai tindakan yang bersifat objektif dan universal, tetapi merupakan hasil interpretasi terhadap pengalaman, nilai, norma, dan kepentingan yang berkembang dalam arena politik lokal. Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana individu atau kelompok membangun makna terhadap suatu fenomena sosial berdasarkan pengalaman hidup mereka. Dalam konteks penelitian ini, makna mengenai kekuasaan, loyalitas, legitimasi, dan strategi politik dipahami sebagai konstruksi sosial yang diproduksi dan direproduksi melalui praktik keseharian para elit partai politik. Dengan demikian, paradigma konstruktivisme memberikan ruang untuk menelaah dimensi simbolik dan kultural yang membentuk habitus politik dalam kontestasi Pilkada Kota Medan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan pertimbangan bahwa kota ini merupakan salah satu pusat politik lokal yang memiliki dinamika elektoral yang kompleks, ditandai oleh keberagaman etnis, agama, serta kompetisi politik yang melibatkan berbagai kekuatan partai politik. Selain itu, berbagai penelitian menegaskan bahwa praktik politik dalam Pilkada Kota Medan berkembang tidak hanya melalui mekanisme demokrasi elektoral yang formal, tetapi juga melalui relasi patronase, pengelolaan identitas politik, serta dominasi elit partai yang berperan dalam menentukan akses kandidat ke arena kontestasi politik (Aspinall & Berenschot, 2019). Penentuan informan penelitian diarahkan kepada pimpinan partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Kota Medan. Kelompok ini dipilih karena memiliki posisi strategis dalam proses kandidasi, pembentukan koalisi, serta perumusan strategi politik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada. karena mereka memiliki posisi strategis dalam proses rekrutmen politik, pembentukan koalisi, dan pengambilan keputusan terkait pencalonan kepala daerah. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja melalui teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan posisi, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam berbagai proses politik lokal. Kriteria tersebut digunakan agar informan yang dipilih memiliki pengetahuan yang memadai serta mampu memberikan informasi yang relevan terkait habitus elit partai dan

reproduksi budaya politik dalam Pilkada Kota Medan. Pemilihan teknik ini didasarkan pada pemikiran Castleberry & Nolen (2018) yang menjelaskan bahwa pemilihan informan secara purposif diarahkan kepada individu yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam proses politik lokal. Pertimbangan tersebut dilakukan agar data yang diperoleh tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai habitus elit partai dan reproduksi budaya politik dalam Pilkada Kota Medan.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, pengamatan langsung di lapangan, serta penelusuran berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai habitus elit partai dan reproduksi budaya politik dalam Pilkada Kota Medan. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur terhadap pimpinan partai politik tingkat kota guna menggali pengalaman, pandangan, dan strategi mereka dalam menghadapi dinamika Pilkada serta hubungan dengan struktur partai di tingkat pusat. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan pada berbagai aktivitas politik seperti rapat konsolidasi, deklarasi dukungan, pertemuan kader, dan kegiatan seremonial partai untuk mengidentifikasi praktik-praktik simbolik yang merepresentasikan relasi kekuasaan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan melalui analisis terhadap surat keputusan partai, berita media lokal, arsip kampanye, foto kegiatan politik, serta regulasi terkait Pilkada. Kombinasi ketiga teknik tersebut memungkinkan dilakukannya triangulasi sumber dan metode sehingga meningkatkan kredibilitas serta validitas temuan penelitian (Flick, 2022).

Analisis data dilaksanakan secara bertahap dengan menerapkan model interaktif (Miles et al., 2020), yang menekankan proses pemilahan dan pemusatan data, penyajian temuan secara sistematis, serta pengembangan kesimpulan melalui interpretasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Model ini memungkinkan peneliti untuk memahami keterkaitan antar-data sekaligus menghasilkan temuan yang lebih mendalam mengenai habitus elit partai dan reproduksi budaya politik dalam Pilkada Kota Medan. Pada tahap awal, seluruh hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen ditranskripsi serta dibaca berulang untuk mengidentifikasi tema-tema yang berkaitan dengan habitus, modal, arena politik, loyalitas, legitimasi simbolik, dan reproduksi budaya politik. Selanjutnya, data dikategorikan melalui proses pengkodean tematik sehingga

memungkinkan hubungan antar kategori dianalisis secara sistematis. Kerangka analisis penelitian ini mengacu pada pemikiran Pierre Bourdieu yang memandang praktik politik sebagai hasil interaksi antara habitus, berbagai bentuk modal, dan arena sosial. Melalui perspektif tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana elit partai mengelola modal sosial, budaya, dan simbolik untuk memperoleh legitimasi, memperkuat posisi politik, serta mempertahankan pengaruhnya dalam arena Pilkada Kota Medan. Tahap akhir dilakukan melalui verifikasi dan triangulasi antar sumber data guna memastikan konsistensi temuan sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme reproduksi budaya politik dalam Pilkada Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Habitus Elit Partai dalam Arena Pilkada Kota Medan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa habitus elit partai politik di Kota Medan terbentuk melalui proses sosialisasi politik yang panjang dan berlapis, dimulai dari pengalaman berorganisasi, keterlibatan dalam jaringan sosial, hingga partisipasi dalam berbagai arena kontestasi politik lokal. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, habitus merupakan sistem disposisi yang terinternalisasi melalui pengalaman historis sehingga menghasilkan pola pikir dan tindakan yang tampak alamiah dalam kehidupan sosial (Bourdieu, 2019). Hasil wawancara dengan Ketua Partai Demokrat Kota Medan, Iswanda Ramli, menunjukkan bahwa proses menjadi elit politik tidak dipahami sebagai pencapaian yang bersifat instan, melainkan sebagai hasil dari perjalanan panjang dalam organisasi politik. Ia menyatakan bahwa:

Politik itu sekolah panjang. Orang yang tidak tahan proses tidak akan bertahan. Jadi modal relasi seperti orang tua dan organisasi saja tidak cukup. Saya bukan tiba-tiba jadi ketua. (Wawancara 7 April 2026)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa posisi elit dibangun melalui akumulasi pengalaman dan penguasaan logika permainan politik (*sense of the game*) yang berkembang dalam arena partai. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Aspinall et al., 2020) terkait keberhasilan elit politik lokal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka menginternalisasi norma organisasi dan membangun legitimasi melalui pengalaman politik yang berkesinambungan (Aspinall et al., 2020).

Proses pembentukan habitus tersebut semakin terlihat ketika para informan menjelaskan pentingnya pengalaman organisasi sebagai fondasi utama dalam membangun karier politik. Ketua Partai Hanura Kota Medan, Janses Simbolon,

menjelaskan bahwa sebagian besar keterampilan kepemimpinan diperoleh melalui aktivitas organisasi sebelum memasuki dunia partai politik. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sekretaris PKS Kota Medan, Datuk Iskandar Muda, yang menyatakan:

Sistem pengkaderan kami memang bertahap. Mulai dari yang aktif organisasi di kampus sampai akhirnya menjadi pengurus partai. Di organisasi dulu kami belajar cara berbicara dan membangun jaringan. (Wawancara 18 April 2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa dan organisasi kepemudaan berfungsi sebagai arena awal pembentukan modal budaya yang kemudian dikonversi menjadi modal politik ketika individu memasuki struktur partai. Menurut Bourdieu (2021), modal budaya tidak hanya berbentuk pendidikan formal, tetapi juga keterampilan komunikasi, kemampuan membaca situasi sosial, dan penguasaan norma organisasi yang memberikan keuntungan dalam kompetisi sosial. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian Haryatmoko (2021) yang menemukan bahwa kaderisasi politik di Indonesia berlangsung melalui proses reproduksi nilai organisasi yang membentuk identitas dan orientasi tindakan para elit partai. Dengan demikian, habitus elit di Kota Medan merupakan hasil sedimentasi pengalaman kolektif yang diwariskan melalui mekanisme kaderisasi dan sosialisasi politik yang berlangsung secara terus-menerus.

Habitus elit partai juga tercermin dalam cara mereka membangun otoritas simbolik dan mempertahankan legitimasi di hadapan kader maupun masyarakat. Hasil observasi menunjukkan bahwa para pimpinan partai cenderung menggunakan bahasa yang tenang, penuh pertimbangan, dan sarat dengan pesan moral mengenai loyalitas, pengorbanan, serta kesetiaan terhadap organisasi. Sebagaimana ketua PSI Kota Medan, yakni Renville Pandapotan Napitupulu menyatakan:

Pemimpin partai harus terlihat tenang. Kalau kita panik, kader akan ragu. (Wawancara 13 April 2026)

Dalam kerangka teori Bourdieu (1991), cara berbicara, gaya tubuh, dan kemampuan mengendalikan emosi merupakan bentuk *embodied cultural capital* yang dapat meningkatkan pengakuan sosial terhadap seorang aktor. Temuan ini memperlihatkan bahwa kekuasaan politik tidak hanya dijalankan melalui jabatan formal, tetapi juga melalui kemampuan menampilkan citra kepemimpinan yang dianggap layak dan berwibawa oleh lingkungan sosialnya. Argumentasi tersebut sejalan dengan penelitian Haryatmoko (2021) yang menjelaskan bahwa kekuasaan simbolik bekerja secara halus melalui pengakuan kolektif sehingga dominasi dapat diterima

sebagai sesuatu yang sah tanpa paksaan langsung. Oleh karena itu, legitimasi elit partai di Kota Medan tidak hanya bersumber dari struktur organisasi, tetapi juga dari kemampuan mereka mengelola simbol, bahasa, dan performa sosial dalam kehidupan politik sehari-hari.

Selain dibentuk oleh pengalaman organisasi dan legitimasi simbolik, habitus elit partai di Kota Medan juga berkembang melalui pengalaman menghadapi ketidakpastian politik yang muncul akibat perubahan koalisi, konflik internal partai, serta intervensi pimpinan pusat dalam proses pengambilan keputusan. Ketua Partai Demokrat Kota Medan Iswanda Ramli mengungkapkan bahwa:

Dalam politik, keputusan tidak hanya berdasarkan aturan, tetapi pada siapa yang memiliki jaringan dan mampu meyakinkan pimpinan pusat. (Wawancara 7 April 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa relasi sosial menjadi sumber daya penting dalam menentukan posisi seseorang di dalam arena politik. Dalam teori Bourdieu (2021), kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pemanfaatan modal sosial, yaitu sumber daya yang diperoleh melalui jaringan hubungan yang terinstitusionalisasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kemampuan membangun kedekatan dengan elit pusat sering kali lebih menentukan dibandingkan kapasitas administratif atau pengalaman teknokratis semata. Hasil penelitian ini mendukung temuan Aspinall dan Berenschot (2019) yang menjelaskan bahwa demokrasi lokal di Indonesia masih dipengaruhi oleh patronase dan jaringan personal yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekuasaan politik. Dengan demikian, habitus elit partai di Kota Medan berkembang dalam arena yang menuntut kemampuan adaptasi tinggi terhadap perubahan konfigurasi kekuasaan.

Karakter adaptif tersebut pada akhirnya melahirkan disposisi pragmatis yang menjadi salah satu ciri utama habitus elit partai dalam Pilkada Kota Medan. Hal ini juga sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua PDIP Kota Medan Hasyim yang menyatakan:

Dalam politik, kita harus siap berubah sikap kalau situasi berubah. (Wawancara 8 April 2026)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dipandang sebagai strategi yang diperlukan untuk mempertahankan posisi dalam arena politik yang dinamis dan kompetitif. Menurut Swartz (2013), habitus memungkinkan aktor melakukan improvisasi terhadap perubahan situasi tanpa kehilangan orientasi dasar yang telah

terinternalisasi sebelumnya. Dalam konteks Pilkada Kota Medan, pragmatisme tersebut tampak dalam pembentukan koalisi, negosiasi dukungan politik, hingga penyesuaian strategi menghadapi perubahan regulasi dan konfigurasi kekuatan partai. Temuan ini juga memperkuat argumentasi Mietzner (2020) bahwa politik lokal Indonesia ditandai oleh kemampuan elit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan struktur kekuasaan tanpa harus meninggalkan jaringan sosial dan simbolik yang telah mereka bangun. Oleh karena itu, habitus elit partai dalam Pilkada Kota Medan dapat dipahami sebagai sistem disposisi yang menggabungkan loyalitas organisasi, kemampuan membangun jaringan, penguasaan simbol politik, dan fleksibilitas strategis yang terus direproduksi dalam praktik politik sehari-hari.

Tabel 1. Relasi Habitus, Modal, dan Praktik Politik Elit Partai

No.	Habitus Elit	Modal yang Digunakan	Praktik Politik	Dampak dalam Pilkada
1	Loyalitas Organisasi	Modal Simbolik	Kepatuhan terhadap keputusan DPP	Memperkuat hierarki partai
2	Kemampuan Berjejaring	Modal Sosial	Negosiasi koalisi	Memperluas dukungan politik
3	Pengalaman Organisasi	Modal Budaya	Rekrutmen kader	Reproduksi elit partai
4	Kepemimpinan Simbolik	Modal Simbolik	Mobilisasi kader	Meningkatkan legitimasi
5	Adaptasi Politik	Modal Sosial dan Politik	Perubahan strategi koalisi	Menjaga posisi dalam arena

Sumber: Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi

Hal ini menjelaskan hubungan antara habitus, modal, dan praktik politik sebagaimana dirumuskan oleh Bourdieu dalam persamaan terkenal:

$$\text{Praktik} = (\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Arena}$$

Dalam konteks Pilkada Kota Medan, habitus elit tidak bekerja secara terpisah dari modal yang mereka miliki. Loyalitas terhadap partai memperoleh kekuatan ketika didukung oleh modal simbolik berupa reputasi dan pengakuan kader. Kemampuan membangun jaringan menjadi efektif karena ditopang oleh modal sosial yang berasal dari hubungan dengan elite pusat maupun tokoh masyarakat. Sementara itu, pengalaman organisasi menghasilkan modal budaya yang memungkinkan aktor memahami aturan permainan politik lokal. Dengan demikian, praktik politik yang muncul dalam Pilkada merupakan hasil interaksi antara habitus, modal, dan arena politik yang terus

direproduksi dari waktu ke waktu.

Reproduksi Budaya Politik dalam Praktik Pilkada Kota Medan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reproduksi budaya politik dalam Pilkada Kota Medan berlangsung melalui proses yang tidak hanya bersifat kelembagaan, tetapi juga melalui praktik sosial yang terus diulang dan diwariskan dalam kehidupan organisasi partai. Dalam perspektif Pierre Bourdieu (2019), reproduksi sosial terjadi ketika habitus yang telah terinternalisasi pada aktor politik terus dipraktikkan dalam arena tertentu sehingga menghasilkan pola perilaku yang relatif stabil dari waktu ke waktu. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa para pimpinan partai memandang Pilkada bukan sekadar mekanisme demokrasi elektoral, melainkan arena untuk mempertahankan jaringan, legitimasi, dan posisi strategis dalam struktur kekuasaan lokal. Ketua Partai Demokrat Kota Medan, Iswanda Ramli, menyatakan bahwa:

Dalam politik, keputusan tidak hanya berdasarkan aturan, tetapi pada siapa yang memiliki jaringan dan mampu meyakinkan pimpinan pusat. (Wawancara 7 April 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan politik tidak sepenuhnya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh modal sosial yang dimiliki aktor dalam jaringan kekuasaan partai. Temuan ini sejalan dengan penelitian Aspinall dan Berenschot (2019) yang menjelaskan bahwa demokrasi lokal di Indonesia masih ditopang oleh patronase dan relasi informal yang berfungsi sebagai instrumen distribusi kekuasaan politik. Dalam konteks ini, reproduksi budaya politik berlangsung melalui pewarisan praktik jaringan dan loyalitas yang terus direproduksi dalam setiap kontestasi Pilkada.

Praktik reproduksi budaya politik tersebut semakin terlihat dalam proses seleksi dan pencalonan kepala daerah yang cenderung dipengaruhi oleh relasi kekuasaan antara struktur partai di tingkat daerah dan pusat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan mengakui bahwa keputusan strategis mengenai kandidat kepala daerah tidak sepenuhnya berada di tangan pengurus daerah, melainkan sangat bergantung pada pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Fenomena tersebut tercermin dalam pernyataan Ketua Partai Gerinda Ihwan Ritonga yang menegaskan bahwa:

Keputusan di pusat tetap menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan karena tentunya mereka sudah melihat peluang kemenangan secara lebih luas. (Wawancara 13 Mei 2026)

Dalam kerangka teori Bourdieu (2021), kondisi ini menunjukkan bagaimana

modal simbolik bekerja melalui legitimasi yang diberikan oleh otoritas politik yang memiliki posisi dominan dalam arena kekuasaan. Menurut Haryatmoko (2021), kekuasaan simbolik bekerja secara efektif ketika aturan dan keputusan yang berasal dari kelompok dominan diterima sebagai sesuatu yang sah oleh anggota kelompok lainnya. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Mietzner (2020) yang menemukan bahwa sentralisasi pengambilan keputusan masih menjadi karakter penting dalam politik partai di Indonesia. Dengan demikian, reproduksi budaya politik dalam Pilkada Kota Medan tidak hanya berlangsung melalui regulasi formal, tetapi juga melalui penerimaan kolektif terhadap struktur hierarki yang telah mengakar dalam organisasi politik.

Selain melalui mekanisme kandidasi, reproduksi budaya politik juga berlangsung melalui berbagai ritual politik yang secara simbolik memperkuat relasi kekuasaan antara elit dan kader partai. Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan konsolidasi partai hampir selalu diawali dengan doa bersama, sambutan tokoh senior, penegasan loyalitas kader, serta penyampaian arahan politik yang menekankan pentingnya soliditas organisasi. Dalam salah satu kegiatan partai yang diamati peneliti, tokoh senior ditempatkan pada posisi paling depan dan memperoleh kesempatan berbicara lebih lama dibandingkan kader lainnya. Praktik tersebut memperlihatkan adanya reproduksi hierarki simbolik yang secara tidak langsung mengajarkan siapa yang memiliki otoritas dan siapa yang harus mengikuti keputusan organisasi. Menurut Turner (2017), ritual merupakan mekanisme sosial yang berfungsi mempertahankan struktur sosial melalui simbol dan performa kolektif yang dilakukan secara berulang. Temuan ini sejalan dengan pandangan Bourdieu (1991) bahwa simbol dan representasi publik berfungsi sebagai instrumen legitimasi yang memperkuat dominasi kelompok tertentu dalam arena sosial. Oleh karena itu, ritual politik yang berlangsung dalam partai tidak dapat dipahami sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi sebagai medium reproduksi budaya politik yang mempertahankan dominasi elit dalam Pilkada Kota Medan.

Reproduksi budaya politik juga terlihat dari cara elit partai membangun dan mempertahankan legitimasi melalui simbol-simbol keagamaan dan identitas sosial yang dekat dengan masyarakat. Analisis dokumentasi menunjukkan bahwa kunjungan kepada tokoh agama, penggunaan simbol religius dalam kampanye, serta narasi moral mengenai kepemimpinan yang amanah menjadi bagian penting dalam strategi politik partai-partai di Kota Medan. Ketua Partai Nasdem Kota Medan, Afif Abdillah,

menyatakan bahwa:

Masyarakat kita masih melihat tokoh agama sebagai panutan, sehingga komunikasi dengan mereka menjadi sesuatu yang penting. Apalagi kita tau bahwa Masyarakat kita sangat kuat dalam hal keagamaan. (Wawancara 6 April 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa modal simbolik yang berasal dari legitimasi keagamaan masih memiliki pengaruh besar dalam membangun kepercayaan publik. Menurut Geertz (1992), simbol-simbol budaya memiliki fungsi penting dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai otoritas dan legitimasi sosial. Argumentasi ini diperkuat oleh penelitian Muhtadi (2019) yang menunjukkan bahwa identitas keagamaan dan kedekatan dengan tokoh agama masih menjadi sumber legitimasi politik yang efektif dalam demokrasi lokal Indonesia. Dengan demikian, reproduksi budaya politik dalam Pilkada Kota Medan berlangsung melalui penggunaan simbol budaya yang secara terus-menerus dihadirkan dalam ruang publik untuk memperkuat posisi dan legitimasi elit politik.

Pada akhirnya, reproduksi budaya politik dalam Pilkada Kota Medan memperlihatkan bagaimana habitus elit yang terbentuk melalui pengalaman organisasi, jaringan sosial, dan relasi kekuasaan terus diwariskan dalam praktik politik sehari-hari. Proses tersebut terlihat dalam pola kaderisasi, mekanisme kandidasi, ritual politik, hingga penggunaan simbol-simbol legitimasi yang secara berulang membentuk cara pandang aktor terhadap kekuasaan dan demokrasi lokal. Pernyataan Ketua Partai Nasdem Kota Medan, Afif Abdillah, yang menyebutkan bahwa:

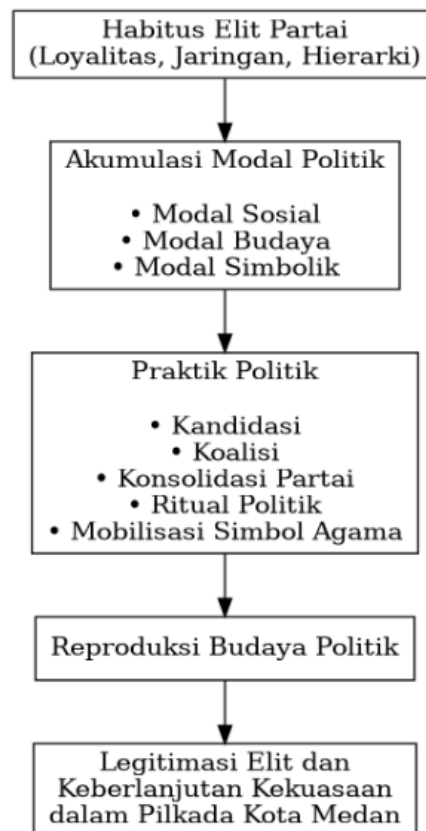
Kalau lewat DPRD, memang benar biaya yang dikeluarkan bisa lebih ringan dan bisa lebih sedikit, tetapi legitimasi politik juga bisa dipertanyakan di masyarakat. (Wawancara 6 April 2026)

Hal ini menunjukkan adanya negosiasi makna demokrasi yang terus berlangsung di kalangan elit partai. Di sisi lain, Ketua Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga, menyatakan bahwa:

Kalau lewat DPRD tentu lebih banyak hal baiknya, selain biaya lebih sedikit juga dapat mengurangi konflik politik yang berkepanjangan. Apalagi kita tahu bahwa dalam Pilkada masyarakat kita sangat transaksional sekali. Jadi hal-hal yang demikian setidaknya bisa kita minimalisir. Karena memang kalau hilang sepenuhnya tidak akan bisa. (Wawancara 13 Mei 2026)

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa elit partai tidak memiliki pemaknaan yang seragam mengenai demokrasi, tetapi tetap beroperasi dalam kerangka

budaya politik yang sama, yaitu menjaga stabilitas kekuasaan dan legitimasi organisasi. Dalam perspektif Bourdieu (2019), kondisi tersebut memperlihatkan bahwa arena politik merupakan ruang pertarungan makna yang diisi oleh aktor-aktor dengan habitus dan modal yang berbeda, tetapi tetap tunduk pada logika permainan politik yang sama. Oleh karena itu, reproduksi budaya politik dalam Pilkada Kota Medan dapat dipahami sebagai proses berkelanjutan yang mempertahankan pola relasi kekuasaan melalui kombinasi habitus, modal, dan arena politik lokal.



Gambar 1. Proses Reproduksi Budaya Politik dalam Pilkada Kota Medan

Gambar bagan di atas menjelaskan bahwa reproduksi budaya politik berawal dari habitus elit yang telah terbentuk melalui pengalaman organisasi dan interaksi dalam arena politik. Habitus tersebut kemudian didukung oleh modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik yang dimiliki oleh aktor politik. Ketika modal tersebut diaktualisasikan dalam praktik politik seperti kandidasi, pembentukan koalisi, konsolidasi partai, dan penggunaan simbol keagamaan, maka terbentuklah proses reproduksi budaya politik yang terus berlangsung dari satu periode Pilkada ke periode berikutnya. Dalam kerangka Pierre Bourdieu, proses ini menjelaskan bagaimana

struktur kekuasaan dapat bertahan karena terus direproduksi melalui praktik-praktik yang dianggap normal oleh para pelakunya. Oleh karena itu, budaya politik dalam Pilkada Kota Medan bukan hanya hasil dari regulasi formal, tetapi juga produk dari interaksi berkelanjutan antara habitus, modal, dan arena politik lokal.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa habitus elit partai politik di Kota Medan terbentuk melalui proses sosial yang panjang, mulai dari pengalaman berorganisasi, keterlibatan dalam jaringan politik, hingga interaksi yang berkelanjutan dengan struktur kekuasaan di dalam partai. Pengalaman-pengalaman tersebut kemudian membentuk cara pandang, pola tindakan, dan strategi politik para elit dalam menghadapi kontestasi Pilkada. Habitus yang berkembang tidak hanya mencerminkan loyalitas terhadap organisasi, tetapi juga kemampuan membaca situasi politik, membangun relasi, serta menyesuaikan diri dengan dinamika kekuasaan yang terus berubah. Dengan demikian, perilaku politik para elit tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keputusan individual, melainkan sebagai hasil dari proses pembelajaran sosial dan budaya politik yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa reproduksi budaya politik dalam Pilkada Kota Medan berlangsung melalui berbagai praktik yang terus diulang dan diwariskan dalam kehidupan organisasi partai. Mekanisme kandidasi, hubungan antara pengurus daerah dan pusat, ritual politik, pola kaderisasi, serta pemanfaatan simbol-simbol sosial dan keagamaan menjadi sarana penting dalam mempertahankan nilai, norma, dan struktur kekuasaan yang telah terbentuk sebelumnya. Praktik-praktik tersebut tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas organisasi, tetapi juga menjadi instrumen dalam membangun legitimasi politik di hadapan kader maupun masyarakat. Akibatnya, budaya politik yang berkembang cenderung terus direproduksi dari satu periode politik ke periode berikutnya melalui proses yang berlangsung secara halus dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa Pilkada Kota Medan tidak hanya merupakan arena kompetisi elektoral, tetapi juga ruang sosial tempat berbagai kepentingan, simbol, dan relasi kekuasaan saling berinteraksi. Dalam arena tersebut, para elit partai berperan sebagai aktor yang tidak hanya menjalankan fungsi politik formal, tetapi juga memproduksi dan mereproduksi makna mengenai kepemimpinan,

loyalitas, legitimasi, dan demokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi lokal tidak dapat diukur hanya melalui keberlangsungan prosedur pemilihan, melainkan juga perlu dilihat dari bagaimana budaya politik dibentuk, dipertahankan, dan dijalankan dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, pendekatan sosio-kultural menjadi penting untuk memahami dinamika politik lokal secara lebih mendalam dan komprehensif.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberlanjutan kekuasaan politik di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh hubungan antara pengalaman sosial, jaringan politik, dan praktik budaya yang berkembang dalam organisasi partai. Temuan tersebut diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian antropologi politik dan demokrasi lokal di Indonesia, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi partai politik dalam memperkuat sistem kaderisasi serta tata kelola organisasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada penguatan demokrasi. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada elit partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Kota Medan sehingga belum sepenuhnya menggambarkan perspektif aktor politik lain, seperti penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, maupun pemilih. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada satu daerah sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada seluruh konteks politik lokal di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, melibatkan beragam aktor politik, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara habitus elit, reproduksi budaya politik, dan kualitas demokrasi lokal di berbagai daerah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan Partai Politik Kota Medan atas dukungan data dalam penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Negeri Medan atas fasilitas penelitian yang sudah diberikan. Begitu juga dengan rekan sejawat dan juga mahasiswa yang turut membantu dalam hal pengumpulan data penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale. In Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.

<https://doi.org/doi:10.7591/9781501732997>

- Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Elites, masses, and democratic decline in Indonesia. *Democratization*, 27(4), 505–526.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1680971>
- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Edited by J.B. Thompson. Translated by G. Raymond and M. Adamson. Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu, P. (2019). *The Logic of Practice*. Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (2021) *The Forms of Capital*. Dalam: Sadovnik, A.R. (ed.) *Sociology of Education: A Critical Reader*. 4th ed. New York: Routledge.
- Castleberry, A., & Nolen, A. (2018). Thematic Analysis of Qualitative Research Data. *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, 10(6), 807–815.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Flick, U. (2022). *An Introduction to Qualitative Research* (7th ed.). Sage Publications.
- Geertz, C. (1992). *Tafsir Kebudayaan*. Terjemahan Francisco Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius.
- Hadiz, V. (2017). Indonesia's Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53, 261–278.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1410311>
- Haryatmoko. (2021). *Kekuasaan dan Dominasi Simbolik: Perspektif Pierre Bourdieu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ikhsan, M., Subhilhar, Kusmanto, H., & Nasution, I. K. (2024). The Dynamics of Regional Head Candidate Selection and Its Implications for Local Democracy: A Case Study of Medan City, Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(4), 32–41.
<https://doi.org/10.62754/joe.v3i4.3464>
- Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. (2021). *Dinamika Partisipasi Pemilih di Kota Medan: Analisis dan Proyeksi*. KPU Kota Medan.
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021–1036.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.

- Muhtadi, B. (2019). *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*. Malang: Intrans Publishing.
- Swartz, D. L. (2013). *Symbolic Power, Politics, and Intellectuals: The Political Sociology of Pierre Bourdieu*. Chicago: University of Chicago Press.
- Turner, V. (2017). *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Abrahams, R. dan Harris, A. (eds.). London: Routledge.
- Ubaidullah, Aminah, A., Harahap, F.G., Hasan, E., & Muliawati, M. (2022). Dampak Politik Identitas pada Pilkada (Studi Kasus Politik Identitas Pasangan Akhyar-Salman pada Pilkada 2020 di Kota Medan). *Jurnal Community*, Vol 8, No 2 (2022), 245–257. <http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/5719/3512>
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. In *Journal of Hospitality & Tourism Research* (Vol. 53, Issue 5). <https://doi.org/10.1177/109634809702100108>